

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAFLENCYO**

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Apakah faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Penyidik Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Secara mendasar sudah memenuhi aspek peranan faktual. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadangkala wajib untuk dilakukan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah masyarakat seharusnya mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Penganiayaan sudah secara baku diatur (sebagai implementasi dari asas legalitas) dalam aturan hukum pidana. Perlu dicermati bahwa Penganiayaan berbeda dengan Pembunuhan. Walaupun keduanya

*Muhammad Raflencho*

merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk Aparat Penegak Hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya Hakim akan dapat memberikan putusan yang tepat.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan salah satu tindak pidana ataupun suatu kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tidak akan pernah tahu kapan terjadinya. Bahwa sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

**Kata Kunci : Peran, Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE INVESTIGATOR AGAINST THE CRIME OF PERSECUTION RESULTING IN DEATH (Study on The Resort Police of The City of Bandar Lampung)**

**By  
MUHAMMAD RAFLENCHYO**

*Persecution is the use of physical force, whether under threat or not, against a person, group, or community that can cause trauma, death, psychological trauma, developmental delays, and harm that violates human rights. Basically the Indonesian National Police as referred to in Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in Article 4 aims to ensure order and upholding of the law and fostering public peace in order to realize security and public order in the context of maintaining domestic security, carrying out the function of state defense and security, and achieving national goals by upholding human rights. The problem in this thesis is: What is the role of the investigator in the crime of maltreatment resulting in death and what are the inhibiting factors for the investigator's role in the crime of persecution resulting in death.*

*The problem approach used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Data source: Primary Data and Secondary Data. Sources: Investigators at the Bandar Lampung City Resort Police and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Section at the University of Lampung.*

*The results of the research and discussion shows that: The role of investigators against crimes of persecution resulting in death is that arrangements regarding persecution always refer to human rights because people want protection for their rights. Human rights are basic rights that are naturally attached to human beings, are universal and direct. This includes the rights that must be obtained by victims of abuse. The role played by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit SAT has basically fulfilled the aspect of the factual role. Investigation as the most important part of criminal procedural law, which in its implementation often has to offend the dignity of individuals, is sometimes required to be carried out. The series of investigative actions are all actions in the name of law carried out by Polri investigators, starting from summons, examination, arrest, detention, confiscation and other actions regulated in legal provisions, applicable laws and regulations until the investigation process is declared complete. With the existence of the law it is intended to create harmony in social life. The inhibiting factors for the role of investigators in the crime of persecution resulting in death consist of several factors, namely legal substance factors, law enforcement officials factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. The inhibiting community factor is that people should understand that people's lives require the existence of law, not only to be a parameter for justice, order, peace and order, but also to guarantee legal certainty.*

**Muhammad Raflencho**

*Suggestions in this study are expected to focus more on the roles and functions of law enforcement officials to seek material truth and realize justice and social welfare. Because persecution that causes death is a crime or a crime that often occurs in society, you will never know when it will happen. That as law enforcement officers in the criminal justice system, they must consider settlements of criminal acts committed by perpetrators of criminal acts in accordance with the provisions of criminal law. The community as an information medium must be more sensitive and play an active role in efforts to deal with persecution that causes death. Even the slightest information is very helpful for the performance of the Police.*

**Keywords: Role, Investigator, Persecution Crime.**